

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP BAPPEDA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2022

I. Perencanaan Kinerja

Rekomendasi:

Langkah perbaikan yang harus dilaksanakan adalah melakukan evaluasi terhadap penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya serta formulasi yang digunakan untuk mengukurnya dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Tindak Lanjut:

Evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda telah dilakukan baik secara internal (Bappeda) maupun meminta masukan kepada tim Kementerian PAN & RB serta berdiskusi dengan beberapa Bappeda Pemerintah Daerah lain. Berdasarkan hasil masukan dari tim Kementerian PAN & RB, IKU yang saat ini diampu Bappeda Kabupaten Malang tidak menjadi masalah karena menjadi IKU di beberapa Bappeda Pemerintah Daerah lain terutama untuk IKU 1 “Persentase Kesesuaian antara Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” dan IKU 3 “Persentase kesesuaian antara Rencana Pembangunan Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah”.

Merujuk pada IKU Bappeda Provinsi Jawa Timur (Dokumen LKj Tahun 2022) dan IKU Kementerian PPN/Bappenas (Dokumen LKj Tahun 2022), IKU yang saat ini diampu oleh Bappeda Kabupaten Malang sudah selaras.

Selain IKU 1 dan 3, Bappeda Pemerintah Daerah lain juga menambahkan IKU sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah untuk mengukurnya. Pada Bappeda Kabupaten Malang hal tersebut terakomodir melalui IKU 2 “Persentase capaian program prioritas $\geq 80\%$ ”. Bappeda Kabupaten Malang berencana mengganti IKU dengan Indeks Perencanaan Pembangunan sesuai dengan indeks yang saat ini diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas namun berdasarkan surat dari Kementerian PPN/Bappenas Nomor: 21306/B.04/PP.01/10/2023, Indikator Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) pada tahun 2023 baru dilakukan pada tingkat provinsi dan tidak dinaikkan pada tingkat Kabupaten/Kota. Indikator tersebut akan dinilai pada tingkat Kabupaten/Kota setelah dilakukan sosialisasi oleh Kementerian PPN/Bappenas, sehingga untuk saat ini langkah perbaikan

yang dilakukan Bappeda Kabupaten Malang atas rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Malang adalah mengakomodir indikator tersebut sebagai salah satu indikator pendukung Indeks Reformasi Birokrasi dalam dokumen Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Malang 2025-2045 yang selanjutnya akan menjadi IKU yang diampu Bappeda Kabupaten Malang dan akan direncanakan tertuang dalam penyusunan dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Malang Tahun 2025-2030.

Evidance:

No

Evidence

1

Tabel 3.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Paruh Waktu Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2020		2021		2022		Target		Status Realisasi IKSS terhadap Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2023	2024	
Tujuan – 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	Indikator Tujuan – 1: Tingkat Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Indonesia								95,5-97,5	
1 Sastra – 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	IKSS – 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	75	93,55	80	90,8	85	93,78	90	95	Belum Tercapai
2 Sastra – 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	IKSS – 2: Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	80-83,9%	100%	84-87,9%	99,68%	88-91,9%	99,75	92-95,9%	96-100%	Tercapai



Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022

III - 6

2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda
Perubahan Renstra Tahun 2019-2024

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran 1: Meningkatnya capaian program pembangunan	Persentase capaian target program	76%	76%	77%	78%	79%	80%

3



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310

Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374

www.bappenas.go.id

Nomor : 21306/B.04/PP.01/10/2023

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampalan Informasi Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)

Jakarta, 30 Oktober 2023

Yth. (Mohon lihat daftar terlampir)

di

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2023 bagi seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah dimana penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) menjadi salah satu komponen penilaian RB General sebagaimana Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, serta sehubungan dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian/Lembaga/Daerah (Pemerintah Provinsi), bersama surat ini kami sampaikan informasi bahwa penilaian IPPN Daerah baru dilakukan pada tingkat Provinsi dan tidak dinilai pada tingkat Kabupaten/Kota. ✓

Hal di atas juga diperkuat oleh Keputusan Menteri PAN RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 bahwasanya Penilaian IPPN Daerah Tahun 2023 hanya sampai pada level Provinsi. Apabila kemudian akan dilaksanakan pada tingkat Kabupaten/Kota, akan kami lakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya penilaian tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, mohon dapat menghubungi staf kami (Sdr. Moh. Ikhlasul Amal/ +62 812-8186-2686).

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara/I, kami ucapkan terima kasih.

4

Asistensi dengan Tim Kementerian PAN & RB

	 Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia Jalan Merdeka Timur, Klojen, Kota Lat -7.982744, Long 112.632086 05/17/2023 10:27 AM 
5	Studi Replikasi membahas terkait IKU yang diampu pada Bappeda Kota Semarang, Bappeda Kabupaten Boyolali, Bappeda Kota Salatiga, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Bappeda Kota Yogyakarta.



II. Pengukuran Kinerja

Rekomendasi:

Langkah-langkah perbaikan yang harus dilaksanakan, sebagai berikut:

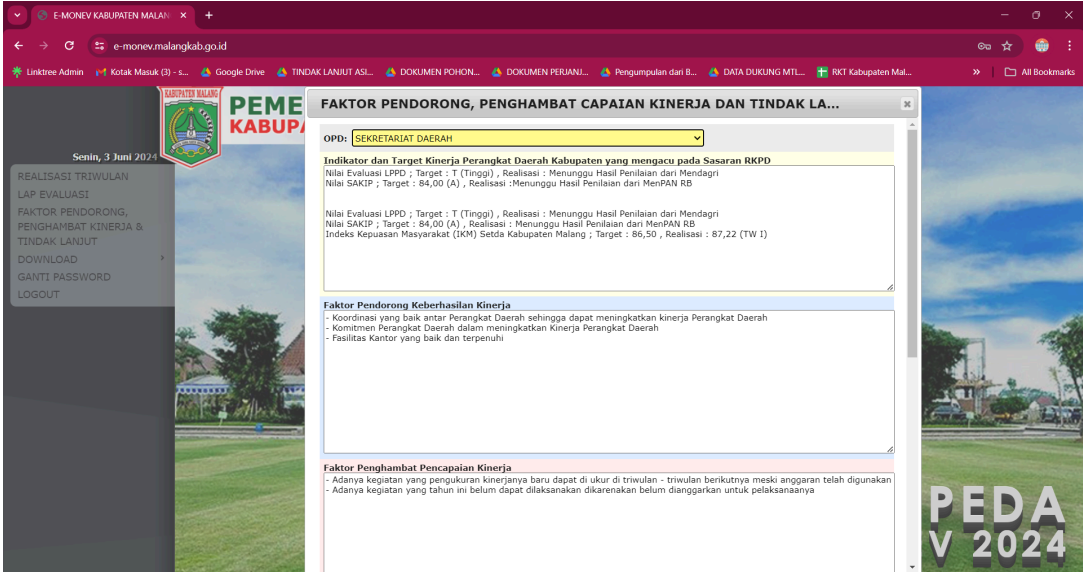
- a. Melakukan evaluasi terhadap data yang digunakan untuk mengukur Indikator Kinerja Utama sehingga efektif dalam pencapaian Indikator Kinerja utama dan sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Pimpinan agar terlibat secara langsung dalam pemantauan atas pengukuran kinerja (monitoring dan evaluasi atas rencana aksi) dengan memberikan rekomendasi sebagai upaya dalam penyesuaian Strategi, Kebijakan dan Aktivitas untuk mencapai target kinerja.

Tindak Lanjut:

- a. Evaluasi selalu dilakukan terhadap data yang digunakan untuk mengukur Indikator Kinerja Utama sehingga efektif dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Malang. Pada pengukuran IKU 1 “Persentase Kesesuaian antara Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” dan IKU 3 “Persentase kesesuaian antara Rencana Pembangunan Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah”, data dukung yang diperlukan bersumber dari dokumen Renja, RKPD, Renstra dan RPJMD yang mana dokumen tersebut berkekuatan hukum dan terus kami monitoring dan evaluasi penyusunannya melalui penggunaan website <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/auth/login> dan <https://e-monev.malangkab.go.id/>. Bappeda Kabupaten Malang juga memastikan penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan dengan melakukan bimbingan teknis dan desk terhadap dokumen perencanaan yang sedang disusun. Monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian IKU dan data yang digunakan untuk mengukur IKU 2 “Persentase capaian program prioritas $\geq 80\%$ ” juga terus dilakukan dengan melakukan desk evaluasi dan monitoring pelaksanaan renja triwulan dan penggunaan website <https://e-monev.malangkab.go.id/>. Melalui website tersebut pengukuran data pada IKU 2 dilakukan *by system* yang input datanya terus di monitoring oleh bidang-bidang di Bappeda yang mengkoordinir perangkat daerah terkait.
- b. Pimpinan telah terlibat secara langsung dalam pemantauan atas pengukuran kinerja (monitoring dan evaluasi atas rencana aksi) dengan memberikan rekomendasi sebagai upaya dalam penyesuaian Strategi, Kebijakan dan Aktivitas untuk mencapai target kinerja. Hal tersebut salah satunya dilakukan melalui penyusunan dokumen Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dalam penyusunannya terus dimonitoring dan dievaluasi oleh pimpinan (Kepala Bappeda dan Kepala di masing-masing Perangkat Daerah lain).

Evidance:

No	Evidance
----	----------

1	Bappeda Kabupaten Malang melakukan evaluasi terhadap data yang diinput pada website e-monev dan memberikan rekomendasi atas permasalahan/faktor penghambat capaian IKU PD. 
2	Desk monitoring dan evaluasi hasil evaluasi Renja PD Tahun 2023 Triwulan IV  Malang, East Java, Indonesia Kepanjen, Malang, East Java, Indonesia Lat 8.141434 S, Long 112.572132 E 01/24/2024 09:21 AM GMT+07.00
3	Asistensi dokumen Renja



III. Pelaporan Kinerja

Rekomendasi:

Langkah-langkah perbaikan yang harus dilaksanakan adalah:

- a. Menyajikan informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja berdasarkan perhitungan atas sumber data yang andal sehingga dapat dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan di tahun selanjutnya.
- b. Menyajikan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja)

Tindak Lanjut:

- a. Bappeda Kabupaten Malang telah menyajikan informasi capaian kinerja pada Laporan Kinerja Bappeda setiap tahunnya, seperti pada Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2023 data terkait capaian kinerja Bappeda telah tertuang pada tabel 3.2 Pencapaian Kinerja, tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dan Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Periode Akhir Renstra. Perhitungan juga didasarkan atas sumber data yang andal dibuktikan dengan penggunaan sumber data yang didasarkan pada data yang ada pada dokumen RKPD, Renja, RPJMD dan Renstra yang dalam penyusunannya dilakukan desk dan monitoring evaluasi untuk memastikan data yang tertuang telah sesuai.
- b. Informasi terkait perbandingan realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Malang dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Kementerian

PPN/Bappenas telah tertuang pada dokumen Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Malang Tahun 2023.

Evidance:

No	Evidance																																																																										
1	Laporan Kinerja 2023 Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Malang dengan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dan PPN/BAPPENAS <table><tr><th colspan="5">BAPPEDA KABUPATEN MALANG</th></tr><tr><th rowspan="2">INDIKATOR KINERJA UTAMA</th><th colspan="2">TARGET</th><th colspan="2">REALISASI</th></tr><tr><th>TAHUN 2022</th><th>TAHUN 2023</th><th>TAHUN 2022</th><th>TAHUN 2023</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>1.1 Persentase kesesuaian antara rencana Pembangunan tahunan daerah dengan rencana Pembangunan jangka menengah daerah</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>1.2 Persentase capaian target program prioritas ≥ 80%</td><td>95,02%</td><td>95,47%</td><td>97,90%</td><td>91%</td></tr><tr><td>1.3 Persentase kesesuaian antara rencana Pembangunan perangkat daerah dengan rencana Pembangunan daerah</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR</th></tr><tr><td>1.1 Persentase keselarasan dokumen perencanaan</td><td>100%</td><td>100%</td><td>99,35%</td><td>data blm rilis</td></tr><tr><td>1.2 Persentase capaian target program</td><td>78%</td><td>79%</td><td>82,39%</td><td>data blm rilis</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS</th></tr><tr><td>Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1 Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.2 Sikronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat</td><td>85</td><td>90</td><td>93,78</td><td>data blm rilis</td></tr><tr><td>1.3 Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dan Solusi a. Indikator Kinerja "Persentase kesesuaian antara Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)" telah tercapai sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan realisasi sebesar III-41 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA KABUPATEN MALANG					INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		REALISASI		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2022	TAHUN 2023	1	2	3	4	5	1.1 Persentase kesesuaian antara rencana Pembangunan tahunan daerah dengan rencana Pembangunan jangka menengah daerah	100%	100%	100%	100%	1.2 Persentase capaian target program prioritas ≥ 80%	95,02%	95,47%	97,90%	91%	1.3 Persentase kesesuaian antara rencana Pembangunan perangkat daerah dengan rencana Pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR					1.1 Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100%	100%	99,35%	data blm rilis	1.2 Persentase capaian target program	78%	79%	82,39%	data blm rilis	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS					Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional					1.1 Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat					1.2 Sikronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat	85	90	93,78	data blm rilis	1.3 Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah				
BAPPEDA KABUPATEN MALANG																																																																											
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		REALISASI																																																																								
	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2022	TAHUN 2023																																																																							
1	2	3	4	5																																																																							
1.1 Persentase kesesuaian antara rencana Pembangunan tahunan daerah dengan rencana Pembangunan jangka menengah daerah	100%	100%	100%	100%																																																																							
1.2 Persentase capaian target program prioritas ≥ 80%	95,02%	95,47%	97,90%	91%																																																																							
1.3 Persentase kesesuaian antara rencana Pembangunan perangkat daerah dengan rencana Pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%																																																																							
BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR																																																																											
1.1 Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100%	100%	99,35%	data blm rilis																																																																							
1.2 Persentase capaian target program	78%	79%	82,39%	data blm rilis																																																																							
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS																																																																											
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional																																																																											
1.1 Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat																																																																											
1.2 Sikronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat	85	90	93,78	data blm rilis																																																																							
1.3 Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah																																																																											

IV. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Rekomendasi:

Langkah-langkah perbaikan yang harus dilaksanakan:

- a. Mengikutsertakan pegawai yang menangani AKIP dalam bimbingan teknik sehingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat dilaksanakan secara optimal.
- b. Memanfaatkan rekomendasi atas evaluasi internal pelaksanaan program dan rencana aksi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.
- c. Melaksanakan evaluasi atas Capaian Kinerja tahun 2022 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 dan merumuskan serta menetapkan kinerja tahun yang akan datang sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja.
- d. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 sebagai langkah perbaikan/penyempurnaan sistem akuntabilitas dan capaian kinerja tahun 2023.

Tindak Lanjut & Evidance:

- a. Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang perencanaan. Langkah yang dilakukan Bappeda untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas SDM di bidang perencanaan sebagai salah satu pendukung perencanaan kinerja yang menjadi komponen yang dinilai pada evaluasi AKIP adalah:
 - Melaksanakan Workshop Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Rangka Persiapan Penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Malang. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai di Bappeda dengan narasumber Seif Eljihadi, LLM. selaku Tenaga Ahli di Ditjen Bina Bangda Kemendagri dan Imam Primagrata, S.STP., MPP. selaku Perencana Ahli Pratama Dit. Perencanaan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.



- Melaksanakan *Capacity Building* Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Malang 2025-2045 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kabupaten Malang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai di Bappeda dengan narasumber Fadillah Putra, MPAFF., Ph.D. selaku Pakar Kebijakan Publik (Universitas Brawijaya) dan Hilman Rosadi, S.A.P., M.A.P selaku Ahli Keuangan Daerah Kemendagri.



- Melaksanakan Studi Replikasi dan Bimbingan Teknis terkait Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Implementasi Pengukuran Kinerja terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Pemerintah Kabupaten Malang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode

sharing knowledge dengan Bappelitbang Kota Bandung yang telah lebih dahulu memperoleh Nilai SAKIP Kategori A. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa perwakilan bidang di Bappeda, Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi, Bagian Administrasi Pembangunan, BKPSDM, dan BKAD.



- Bappeda telah mengikutsertakan pegawai yang menangani perencanaan/penyusunan dokumen AKIP pada kegiatan Asistensi Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.





- Bappeda bersama tim SAKIP Kabupaten Malang melakukan asistensi dengan tim Kementerian PAN & RB terkait proses penyusunan pohon kinerja, cascading dan crosscutting. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kapasitas SDM dalam proses penyusunan dokumen pendukung AKIP Kabupaten.



- b. Memanfaatkan rekomendasi atas evaluasi internal pelaksanaan program dan rencana aksi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang, seperti menindaklanjuti rekomendasi inspektorat sebagai tindak lanjut LHE AKIP.
- c. Telah melaksanakan evaluasi atas Capaian Kinerja tahun 2022 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 dibuktikan dengan penyusunan laporan tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Bappeda Tahun 2023 dan telah merumuskan serta menetapkan kinerja tahun yang

akan datang sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja yaitu dengan akan menggunakan indikator Indeks Perencanaan Pembangunan sebagai IKU yang diampu Bappeda dan akan direncanakan tertuang dalam penyusunan dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Malang Tahun 2025-2030.

- d. Telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 sebagai langkah perbaikan/penyempurnaan sistem akuntabilitas dan capaian kinerja tahun 2023.

Kepanjen,

2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ir. TOMIE HERAWANTO, M.P.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 1993031004